

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Majid. 2007. *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba*, Semarang; Bengawan Ilmu.
- Adami Chazawi. 2006. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Alumni.
- . 2011. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 7
- Amir Ilyas dan Jupri. 2018. *Justice Collaborator Strategi Mengungkap Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta; Genta Publishing.
- Andi Hamzah. 2000. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta; Sinar Grafika.
- Andi Sofyan dan Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta; Kencana.
- Barda Nawawi Arief. 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- . 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- . 2010. *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan kejahatan Dengan Pidana Penjara*. Yogyakarta; Genta Publishing.
- Erlina Maria Christin Sinaga dan Sharfina Sabila. 2020. *Narkotika Anak Pidana dan Pemidanaan*. Depok: Rajawali Press.
- Firman Wijaya, 2012, *Whistle Blower dan Justice collaborator dalam Perspektif Hukum*, Jakarta: Penaku.
- Heri Tahir. 2010. *Proses Hukum yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Yogyakarta; Laksbang Pressindo.
- Hyronimus Rhiti. 2011. *Filsafat Hukum: Dari Klasik sampai Postmoderenisme*. Yogyakarta; Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Irwansyah dan Ahsan Yunus. 2020. *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel Edisi Revisi*. Yogyakarta; Mirra Buana Media.
- Mardjono Reksodiputro. 2013. *Perenungan Perjalanan Reformasi Hukum*. Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia. Jakarta.
- Muhadar. *et.al.* 2010. *Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*. Surabaya; Putra Media Nusantara.
- Munir Fuady. 2006. *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*. Bandung; Citra Aditya Bakti.
- M. Agus Santoso. 2014. *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*. Jakarta: Kencana.
- M. Syukri Akub dan Baharuddin Badaru. 2012. *Wawasan Due Process Of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education.
- Peter Mahmud Marzuki. 2022. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Prenadamedia Grup.
- Satjipto Rahardjo. 2012. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Abadi.
- Supramono, G. 2001. *Hukum Narkotika Indonesia*. Jakarta: Djambatan.

Solehuddin. 2003. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide dasar Double Track System & Implementasinya*. Jakarta; RajaGrafindo Persada.

Yesmil Anwar dan Adang. 2008. *Pembaharuan Hukum Pidana, Reformasi Hukum Pidana*. Jakarta: Gramedia.

B. Tesis

Choirul Musta'in. 2015. *Tinjauan Hukum Justice Collaborator Sebagai Upaya Pengungkapan Fakta Hukum Kasus Tindak Pidana Korupsi Dalam Persidangan*. Tesis. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

M. Fadhlán Fadhil B.. 2019. *Perlindungan Terhadap Whistle Blower dan Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Narkotika*. Tesis. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Melvia Body Panjaitan. 2016. *Konsep Justice Collaborator Dalam Praktik Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Tesis Fakultas Hukum Univeristas Indonesia.

C. Jurnal dan Karya Ilmiah lainnya

Bambang Sugiri. et.al. 2021. *The Position Of Convict as Justice Collaborator In revealing Organized Crime*. Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum. Univeritas Padjajaran.

Eddy O.S. Hiarej. 2010. Legal Opini: Permohonan Pengujian Pasal 10 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Jakarta; Newslette Komisi Hukum Nasional.

Isti Latifah Astri. et.al. 2021. *Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Narkotika, Indonesia Law Reform Jurnal*. Univeritas Muhammadiyah Malang. Volume I Nomor 1.

Irwanto Eka Putra Rahim. Audyna Mayasari Muin. Hijrah Adhyanti Mirzana. 2021. *Justice Collaborator dalam Mengungkap Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang*. Petitum. Magister Hukum. Universitas Indonesia Timur, volume 9 Nomor 2.

Lilik Mulyadi. 2014. *Perlindungan Hukum Whistleblower dan Justice Collaborator dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime di Indonesia Masa Mendatang*. Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Padjajaran.

-----, et al. 2013. *Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower dan Justice collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*. Laporan Penelitian. Pusat Penelitian Pengembangan Mahkamah Agung RI.

-----, 2007, *Asas Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Dihubungkan Dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003*, Artikel Disertasi, Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran.

- Mas Achmad Sentosa. 2011. *Perlindungan Terhadap Pelaku yang Bekerja sama (justice collaborators)*. Makalah disampaikan Pada Internasional workshop On The Protection of Whistblower as Jsutice Collaborators, diselenggarakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) kerjasama dengan Sagas Pemberantasan (PMH), Jakarta.
- Hyronimus Rheti, 2011, *Filsafat Hukum: Dari Klasik sampai Postmoderenisme*. Yogyakarta; Universitas Atma Jaya Yogyakarta. hlm. 241.
- Noah Buckley. *et al.* 2016. *Cooperating with the State: Evidence from Survey Experiments on Policing*. Journal of Experimental Political Science 3. The Experimental Research Section of the American Political Science Association. Cambridge University Press & Assessment.
- Piero Luigi Vigna. 2006. *Fighting Organized Crime with Particular Reference to Mafia Crimes in Italy*. Journal of International Criminal Justice. Volume 4 Issue 3. Oxford University Press.
- Pierre Hauck dan Sven Peterke. 2010. *Organized Crime And Gang Violence In National And International Law*. Internasional Review of The Red Cross. Volume 92 Number 878. International Committee of the Red Cross.
- Pusat Penelitian, Data dan Informasi Badan Narkotika Nasional. 2022. *Indonesia Drug Report 2022*. PUSLIDATIN BNN.
- Rahman Amin. 2017. *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Terdakwa Justice Collaborator Narkotika Sebagai Justice Collaborator (Studi Mahkamah Agung RI Nomor 920/Pid.Sus/2013)*. Jurnal Bina Mulia Hukum, Volume 1 Nomor 2.
- Syarif Saddam Rivanie. *et. al.* 2022. *Perkembangan Teori-teori Tujuan Pidanaan, Halu Leo Law Review*, Volume 6 Issue 2, Fakultas Hukum Universitas Halu Leo, Kendari.
- United Nations Office on Drugs and Crime. 2008. *The Goods Practices for the Protection In Witness In criminal Proccedings Involving Organized Crime*. New York: United Station.

D. Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003)
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nations Covention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi 2000)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi pelanggaran HAM

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : M.HH-11.HM.03.02.th.2011, Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-045/A/JA/12/2011, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor: 1 tahun 2011, Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: KEPB-02/01-55/12/2011 dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia Nomor: 4 tahun 2011.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.



Dokumentasi wawancara terhadap Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulsel
Brigjen Pol. Dr. Drs. Guruh Ahmad Fadiyanto, MH





Dokumentasi wawancara terhadap Kepala Bidang Pemberantasan Narkotika(BNN) Pov. Sulsel; Kombes Pol. Dr. Agustinus Sollar. S.H., M.Si .



Kombes Pol. Darmawan Affandy, S.I.K, M.M, Direktur Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Selatan



Bambang W, S.H, M.Kes, Kepala Bidang Pencegahan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan,



Penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan, yang bertanggung jawab atas kasus justice collaborator di Bone